

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DANAU TOBA

Jeklin F. Purba¹
Agustinus B. Pati²
Franky R.D. Rengkung³

Abstrak

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap pembangunan suatu wilayah. Dalam penelitian ini menggunakan Rumusan masalah adalah bagaimana Implementasi Pemerintah Kabupaten Simalungun Dalam Pengembangan Pariwisata Danau Toba. Serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah simalungun dalam pengembangan pariwisata Danau Toba. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi dan metodologi fenomenologi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada observasi dilakukan secara langsung kepada responden dengan beberapa pertanyaan. Teori yang digunakan yaitu Teori Edward yang mengemukakan bahwa ada empat konsep implementasi yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metodologi fenomenologi, Penelitian ini dilakukan pada beberapa tempat seperti Dinas Pariwisata, Kepala Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Simalungun. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan menjabarkan pertanyaan, melihat data peningkatan, melakukan sintesa, memilih mana data pertanyaan yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sejak 19 Desember 2021-21 Februari 2022, wawancara yang dilakukan peneliti dilakukan pada prinsipnya untuk mengumpulkan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Danau Toba Dalam pengembangan Pariwisata Danau Toba.

Kata Kunci: *Pariwisata, Implementasi, kebijakan, Pemerintah, Danau Toba*

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

Sekretariat:

*Gedung c, Lantai 2, Fispol Unsrat
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Pendahuluan

Dalam suatu kebijakan pemerintah daerah dengan rangka memajukan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Danau Toba secara administrative berada di Provinsi Sumatera Utara. Daerah ini termasuk dari bagian wilayah administrasi dari 7 pemerintahan kabupaten yaitu:

- a) Kabupaten Samosir
- b) Kabupaten Toba Samosir,
- c) Kabupaten Dairi,
- d) Kabupaten Karo
- e) Kabupaten Humbang Hansudutan
- f) Kabupaten Tapanuli Utara dan
- g) Kabupaten Simalungun (mulai tahun 2017, Kabupaten pak-pak Bharat telah masuk).

Dengan rencana percepatan pembangunan pariwisata di daerah ini, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden dan kementerian terkait telah menugaskan setiap daerah untuk fokus terhadap peningkatkan destinasi wisata Danau Toba dengan memberikan dukungan dan memperkuat daripada kebijakan dan program yang diperlukan, serta berupa dokumen perencanaan khusus dari rencana aksi daerah yang terkait dengan upaya percepatan. Mulai dari pertengahan 2016, setiap kabupaten telah membuat susunan rencana aksi pengelolaan terhadap lingkungan Danau Toba dan pengembangan kawasan wisata Danau Toba serta telah dibentuk di tingkat provinsi.

Adapun fokus kebijakan dari penelitian ini adalah peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 5 tahun 2018 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Sumatera utara tahun 2017-2025. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 5. Undang-Undang

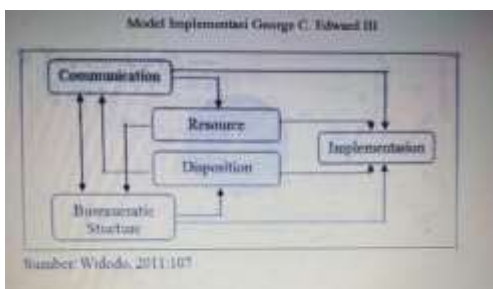
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya; 13. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025; 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Kebijakan ini juga diikuti dengan peraturan daerah Kabupaten simalungun Nomor 4 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Simalungun yang membagi beberapa wilayah prioritas pengembangan daerah wisata termasuk parapat Girsang sipangan Bolon.

Dalam perumusan usulan kebijakan, acuan lain yang digunakan terhadap peneliti adalah Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 tahun 2016, dengan pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Didalam peraturan ini merupakan keinginan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan. Dalam Peraturan Menteri ini telah ditentukan penunjuk, kriteria, dan bukti pendukung yang mengatakan bahwa destinasi wisata telah dikelola secara berkelanjutan. Kriteria dalam hal ini yaitu

ukuran yang menjadi dasar untuk menilai atau menentukan suatu destinasi pariwisata. Indikator adalah sesuatu yang bisa diberikan untuk petunjuk dalam penjelasan tentang kriteria destinasi pariwisata yang melaksanakan pariwisata berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Bagan dengan model implementasi menurut (Edward III, 2010)



Gambar 1 Implementasi dengan George C. Edward III

Dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dibahas dalam studi yang berfokus pada hal yang menjadi indikator keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan dalam teori Edward III, yaitu:

1. Faktor komunikasi, ialah penyampaian informasi. Dalam penyampaian informasi perlu adanya arahan dan mengharuskan kebijakan dikomunikasikan secara jelas kepada pelaksana pengembangan pariwisata baik kepada kelompok sasaran dan pihak berkepentingan terhadap yang lain sehingga di antaranya memahami tujuan daripada isi kebijakan publik sehingga masyarakat tahu apa yang harus disiapkan dan implementasi agar kebijakan tersebut efektif. Diperlukan dimensi yang kohesif agar penerapan kebijakan agar tidak menimbulkan kesalahan sehingga kelompok tepat sasaran dan pihak-pihak yang berkepentingan tidak merasa dirugikan.
2. Sumber daya, dalam hal ini kebijakan penting dalam konsistensi ketentuan dan aturan dalam bertanggungjawab. Dalam hal ini yang merupakan sumber daya mencakup seperti manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.
 - a) Pada Sumber daya manusia, dalam pelaksanaan terhadap suatu implementasi kebijakan tidak

berhasil kalau tidak ada bantuan daripada SDM

- b) Anggaran ini yang berkaitan dengan cukupnya sebuah modal dalam pendanaan atau investor dalam sebuah program atau kebijakan dalam menjamin terlaksananya kebijakan. Jika tidak ada bantuan anggaran yang cukup maka kebijakan berjalan dengan tidak efektif untuk mencapai tujuan daripada kebijakan implementasi.
- c) Fasilitas, dimana fasilitas mempengaruhi implementasi kebijakan.
- d) Informasi dan kewenangan, factor implementasi yang penting dalam mencakup informasi yang relevan
- e) Informasi dan kewenangan, factor implementasi yang penting dalam mencakup informasi yang relevan

3. Disposisi merupakan kebijakan yang berperan penting dalam mencapai implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Karakteristik merupakan bagian penting dalam penegak kebijakan adalah komitmen yang tinggi
4. Struktur birokrasi, dengan demikian, berpengaruh secara signifikan terhadap suatu implementasi kebijakan. Ruang lingkup pedoman kelembagaan adalah peraturan berupa sistem manajemen yang menghubungkan berbagai kepentingan antar dinas yang terlibat.

Pengertian Kebijakan

Dalam sebuah kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Kebijakan menjadi pedoman terhadap tindakan untuk memperoleh hasil apa yang diharapkan. Dalam suatu kebijakan dapat menyatakan pada proses keputusan penting terhadap organisasi termasuk prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya sesuai dampaknya. Kebijakan juga merupakan mekanisme dalam mencapai suatu tujuan yang jelas. Dalam pernyataan (Islamy, 2000) kebijakan itu sejalan dengan sebuah tindakan yang mempunyai tujuan yang dilaksanakan oleh sekelompok pelaku dalam memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa kebijakan itu kegiatan dalam

pelaksanaan tindakan yang mempunyai tujuan yang di dalamnya dalam arahan pemerintah dan masyarakat sebagian besar dalam keterkaitan kebijakan tersebut. Kebijakan dibuat dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan prinsip pihak yang membuat kebijakan mempunyai kewenangan dalam pelaksanaannya.

Dengan Kata lain sebagai pedoman untuk bertindak sebagai pengambilan keputusan. Secara garis besar kebijakan publik adalah tahapan dalam perumusan masalah kebijakan dalam sebuah implementasi. Seperti hal yang kita ketahui kebijakan berbeda dengan hukum. Dalam sebuah kebijakan ini menjadi pedoman dalam tindakan untuk memperoleh hasil diharapkan, sedangkan dalam hukum sifatnya dapat berupa memaksa, melarang dan mengharuskan.

Kebijakan publik

Pengertian kebijakan publik (public policy) secara etimologi tergantung dari sudut mana kita memaknainya. Dalam Easton kebijakan publik diartikan sebagai alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat atau sebagai alokasi nilai yang koersif kepada semua anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga memberikan pengertian kebijakan publik yaitu sebagai program antisipasi dalam mencapai tujuan dan nilaidalam kegiatan yang tertuju.

Menurut (Winarno, 2002) kebijakan publik adalah pendapat yang berisi kondisi awal dan konsekuensi yang dapat diprediksi. Kebijakan publik harus dibedakan dari bentuk kebijakan lainnya, seperti kebijakan privat. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor non pemerintah. Dalam (Abdul, 2005) menjelaskan kebijakan public yaitu sebuah tindakan sanksi yang mengarah pada tujuan tertentu dan diarahkan dalam sebuah masalah yang saling terkait untuk mempengaruhi sebagian besar warga negara.

Dalam pengertian kebijakan publik menurut berbagai ahli yang telah diuraikan di atas, terdapat berbagai macam pola pikir atau pendapatnya masing-masing. Namun, kebijakan tersebut tergantung pada tindakan perorangan atau kelompok yang memiliki peran dalam kebijakan tersebut. Dapat

dikatakan seperti itu karena kebijakan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perintah.

Ciri-ciri kebijakan publik, yaitu

Menurut Nugroho karakteristik kebijakan publik

1. Kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah dimengerti, karena artinya adalah hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional.
2. Kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah dihitung karena ukurannya jelas, yaitu sejauh mana perkembangan yang telah dicapai sampai tujuan terlaksana.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Data Primer diperoleh melalui:

1. Wawancara, khususnya melakukan tanya-jawab langsung dengan pemangku kepentingan tentang hal yang belum jelas untuk melengkapi dalam pengumpulan data. Wawancara merupakan alat utama dalam penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode pengumpul data dengan menanyakan sesuatu kepada responden. Dalam penelitian ini melibatkan percakapan dengan tatap muka dan pedoman wawancara.
2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengancara observasi langsung ditempat peneliti untuk memperoleh data dalam melengkapi melalui wawancara. Pengertian yang dikemukakan oleh Menurut Nawawi & Martini (1991) mengenai observasi yaitu pengamatan serta melakukan pencatatan secara sistimatis terhadap faktor yang terlihat dalam suatu objek penelitian

Data Sekunder diperoleh melalui:

- a) Penelitian refrensi yaitu melakukan pembelajaran dengan mempelajari sejumlah karya, artikel ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang dikaji.
- b) Penelitian kerja lapangan, di mana data dikumpulkan melalui kerja lapangan

Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis mengacu dengan model implementasi kebijakan yang diluaskan oleh Edward sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen lain yang dikemukakan oleh Edward dan membagi implementasi kedalam 4 bagian pengembangan implementasi kebijakan yang menjadi fokus indikator keberhasilan suatu implementasi. Kebijakan itu dikembangkan menjadi:

1. Komunikasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata Danau Toba

Komunikasi berkesinambungan dengan bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan dengan berbagai organisasi, ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan dan bagaimana struktur organisasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini bagaimana pemerintah Kabupaten Simalungun menjalankan Implementasi kebijakan dalam pengembangan pariwisata Danau Toba terhadap masyarakat sekitar dan kepada para pengunjung.

Pada komunikasi ini terkait dengan pemberdayaan dan pengelompokan sadar wisata Danau Toba, keramba jaring apung, pengenalan dan promosi yang terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah dalam melakukan program dalam komunikasi adanya kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan swasta karena dengan kebijakan serta kerjasama ini sangat membantu dalam proses implementasi kebijakan,

Pemerintah bekerjasama dalam hal ini melakukan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dimana pemerintah memberikan fasilitas dalam pengembangan pariwisata untuk menciptakan pariwisata Danau Toba yang sejahtera dalam masyarakat. Dengan demikian pemerintah menerapkan kebijakan dalam membuka lapangan pekerjaan terhadap masyarakat agar mampu mengurangi pengangguran di sekitar Danau Toba.

Dalam pemerdayaan pemerintah memberikan fasilitas dalam terbukanya

sektor kepariwisataan terhadap Danau Toba. Terbukanya sektor pariwisata ini juga tidak terlepas dari kerjasama antar pemerintah, masyarakat dan swasta. Dimana pada komunikasi ini pemerintah memberikan fasilitas, swasta dalam investor memberikan pendanaan, dan masyarakat sebagai pendukung/penggerak dalam pengembangan pariwisata. Dalam hal ini menurut Edward komunikasi dalam pengembangan ini sangat penting, karena dapat mendukung pengembangan pariwisata dimana komunikasi ini dilakukan dengan jelas, dan konsisten.

Komunikasi/penyampaian informasi diberikan kepada masyarakat dan pengunjung secara langsung dan tidak langsung. Adapun komunikasi kebijakan dirumuskan secara jelas terhadap pelaksanaannya dalam kepentingan dan tujuan bersama. Dalam keramba jaring apung pemerintah memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat dengan mata pencaharian keramba jaring apung untuk mengurangi pengelolaannya pemerintah melakukan hak itu untuk mengurangi pencemaran lingkungan terutama terhadap Danau Toba.

Pada pengelolaan limbah pemerintah memberikan penjelasan langsung dan tidak langsung kepada publik dan pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan. Pemerintah memberikan informasi secara jelas dan konsisten dalam pengembangan pariwisata dan masyarakat melakukan kebijakan tersebut. Pengenalan dan promosi terhadap pariwisata diberikan informasi secara langsung dan tidak langsung misalnya membuat informasi pada spanduk dan media sosial. Dalam hal ini pemerintah memberikan kebijakan ini kepada masyarakat dengan tujuan pengunjung dapat tertarik terhadap pariwisata Danau Toba.

Dalam kegiatan ini masyarakat juga berperan penting, karena jika tidak adanya masyarakat yang terkait, maka pengembangan pariwisata ini sedikit sulit untuk dijalankan. Bukan berarti tidak bisa dijalankan, karena ketika masyarakat ikut berperan dalam pengembangan pariwisata maka kebijakan lebih mudah untuk dilaksanakan. Dalam sebagai penyedia

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

keuangan ini juga berperan dalam pengembangan pariwisata. Sebagaimana Investor ini bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat. Dengan hal ini masyarakat lokal yang sebagai pekerja tetap. Misalnya dalam suatu acara Dengan adanya ini maka bisa dikatakan mengurangi pengangguran terhadap asyarakat.

Dalam hal ini anggota yang sebagai pelaku dalam pariwisata dalam mendukung pengemabngan pariwisata, pemerintah sebagai penyedia fasilitas serta penataan lingkungan dan investor sebagai penyediaan keuangan. Dalam promosi ini pemerintah secara langsung berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata kepada pengunjung untuk membentuk edukasi terhadap objek wisata, biasanya melakukan event atau acara tertentu. Pada iklan, komunikasi yang dilakukkann secara tidak langsung yang mengungkapkan keindahan Danau Toba. Pada iklan ini di buat sebgasus mungkin untuk menarik perhatian pengunjung.

Dalam komunikasi ini adanya kerjasama antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Adapun kebijakan itu seperti memberi fasilitas atau dorongan terhadap UMKM, peningkatan kualitas infrastruktur seperti pemanfaatan dana desa dan alokasi dana nagori, pengembangan pariwisata dan ekonimi kreatif, dan adanya restrukturisasi anggaran (perbaikan postur APBD) seperti peningkatan pendapatan dalam mewujudkan kemandirian fiscal dan efisiensi belanja.

Pada komuikasi ini diberikan secara jelas dan konsisten terhadap pengembangan pariwisata dan tidak menimbulkan kerugian terhadap suatu pihak sehingga pengembangan ini dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, menurut model Edwards, faktor komuikasi dapat mendukung pengembangan pariwisata teradap Danau Toba dan komunikasi kebijakan implementasi kebijakan dapat ditingkatkan.

Hasil penelitian kepada Dinas Pariwisata Simalungun yang telah dilakukan, mesikpun komunikasi ini telah di laksanakan, namun masih ada kendala terhadap keterbatasan waktu dan anggaran

yang kurang memadai. Walaupun komunikasi ini dilakukan secara jelas dan konsisten namun dilapangan masih ada ditemui adanya kelalaian dalam melaksanakan komunikasi ini. Seperti Dinas Pariwisata kurang sosialisasi secara langsung oleh masyarakat dalam memahami implementasi kebijakan yang dilakukan. Hal ini yang bisa menimbulkan kurangnya interpretasi dalam kebijakan yang mau disusun atau yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

2. Sumber daya dalam pengembangn pariwisata Danau Toba

Danau Toba merupakan objek pusat wisata yang ada di Sipanganbolon, karena objek pariwisatanya sangat indah. Ketertarikan tempat pariwisata Danau Toba diminati oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Danau Toba menjadi sumber daya yang seara ekologis yang memiliki peran penting dalam sumber pendapatan masyarakat sekitar yang menjadi sumber mata penaharian. Dapat dilihat dari segi ekonomi, pemanfaatan Danau Toba di bidang pariwisata yang dikelola oleh masyarakat di bawah pantauan pemerintah Kabupaten Simalungun. Pariwisata Danau Toba ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan misalnya lapangan pekerjaan, sumber daya manusia, fasilitas, dan wahana. Dalam melaksanakan sumber daya, dinas pariwisata yang bertanggung jawab dalam Implentasi pengembangannya dan dibantu oleh bawahannya.

Dalam sumber daya anggaran pemerintah memberikan pendanaan dalam pengembangan pariwisata. Anggaran yang diberikan berupa APBD karena dalam pengembangan tidak terlepas dari pendanaan untuk mendukung peningkatan pengembangan pariwisata. Pemerintah memberikan APBD dengan ketentuan dan kebijakan yang bertanggungjawab. Anggaran ini berkaitan dengan cukupnua modal atau investasi dalam terlaksananya kebijakan tersebut. Apabila tidak ada dukungan terhadap anggaran yang maka kebijakan kurang efektif untuk dilaksanakan. Pada pemberdayaan masyarakat pemerintah kabupaten simalungun juga menganggarkan APBD sebesar 1,3M. Dana tersebut ditujukan

untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar serta untuk peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.

Dalam sumber hampir semua pihak ikut dalam pengembangan pariwisata Danau Toba. Misalnya dalam segi lahan, masyarakat sebagai penyedia lahan, swasta sebagai investor, dan pemerintah sebagai fasilitator penyediaan sumber daya. Pada Danau Toba ini masih minimnya tempat spot foto yang ada disekitar. Maka dengan adanya penambahan spot foto bisa menjadi daya Tarik terhadap pengunjung Danau Toba.

Dalam pengolahan limbah pemerintah menyediakan tempat pembuangan sampah yang baik agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Dimana pemerintah bekerjasama terhadap masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pada pengenalan dan promosi pemerintah memperhatikan pemasangan iklan dan sapnduk yang diabntu oleh masyarakat untuk menarik oerhatian pengunjung wisata Danau Toba. Dimana dalam pengenalan dan promosi pemerintah, masyaraat dan swasta melakukan suatu kegiatan yang mendukung dalam pengembangan pariwisata.

Dari segi sarana dan prasarana pemerintah bekerjasama dengan investor dan masyarakat untuk menunjang fasilitas Danau Toba. Dalam hal akomodasi sudah dipersiapkan bagi pengunjung yang ingin bepergian dengan santai. Tarif akomodasi yang dikenakan biaya normal dan tidak ada kenaikan harga tinggi bagi hari libur dan sebagainya. Karena dengan adanya kenaikan harga maka bisa menimbulkan rasa kecewa bagi pengunjung yang datang. Dala hal promosi bisa dilakukan paket liburan seperti sudah meberikan dari penyediaan penginapan, keliling untuk menikmati sekitaran Danau Toba dan sudah mencakup makan.

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan Danau Toba yang sebagai sumber daya belum optimal dalam pelaksanaannya karena masyarakat sekitar hanya memanfaatkan

atau mengelola masih seadanya. Dari segi pemasaran masih menggunakan hal yang biasa seperti pemasangan spanduk dan promosi hanya di sekitar jalan. Kita bisa lihat saat ini banyak media sosial yang bisa digunakan dalam pemasaran, namun hal ini belum optimal dilakukan karena bisa dikatakan kurangnya kreatif pada pemasaran tersebut.

3. Struktur Birokrasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata Danu Toba

Birokrasi merupakan bagian administrasi yang berperan dan bertanggung jawab dalam Implementasi kebijakan. Birokrasi memegang kekuasaan dalam daerah implementasi kebijakan di bidang kegiatannya karena mendapat amanat dari lembaga legislatif. Birokrasi adalah badan yang menjadi penegak kebijakan yang teratur.

Berdasarkan hasil dan wawancara bersama Kepala Dinas, dalam pengelolaan Danau Toba sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Namun pemerintah tidak bekerja sendiri melainkan ada staff yang membantu. Pemerintah juga bekerjasama dengan masyarakat dan Swasta dalam pengelolaannya. Misalnya dari bidang akomodasi seperti hotel, dimana masyarakat sebagai pekerja tetap, investor sebagai pendanaan dan Pemerintah sebagai fasilitator. Namun yang bertanggungjawab dalam kebijakan ini adaah pemerintah. Dalam pelaksanaannya adanya standart yang berlaku dalam kebijakan implementasi yang efektif dari program pemerintah Danau Toba.

Dalam pelaksanaan implementasi pengembangan pariwisata ini struktur birokrasi yang bertanggung jawab pemerintah bersama dengan sawasta dan masyarakat. Bisa dikatakan semua kalangan ikut berperan dalam struktur birokrasi ini baik dari pusat dan daerah saling berkordinasi. Hasil penelitian dari wawancara oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Simalungun belum maksimalnya standrat operasional yang mendukung implementasi kebijakan tersebut. Sehingga implemntasi kebijakan pengembangan pariwisata belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Akan tetapi Pariwisata yang ada di Danau Toba ini tetap terus berjalan dan adanya perbaikan dalam

pendukung impelemntasi. Dengan adanya dukungan yang jelas, maka Implementasi dapat mencapai tujuan serta kebijakan yang diinginkan dalam pariwisata.

4. Disposisi/Kecenderungan dalam Pemerintah Daerah dengan pengimplementasian kebijakan pengembangan Pariwisata Danau Toba

Dapat dilihat dengan persepsi kebijakan pengembangan pariwisata dari pelaksana belum cukup mendukung. Berdasarkan hasil penelit pegembangan pariwisata ini masih mengalami hambatan. Dapat dilihat dari segi fasilitas, walaupun fasilitas sudah ada, tetapi masih belum memadai. Dimana masyarakat sekitar juga masih kurangnya kesadaran dalam menjaga lingkungan dalam hal pembuangan sampah. Walaupun demikian untuk keamanan dan kenyamanan sudah baik karena banyak dari pengunjung yang memberikan kesan positif terhadap perjalanannya.

Hambatan dalam Danau Toba ini dilihat dari implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang masih kurangnya perhatian oleh Pemerintah Daerah. Hal ini karena belum maksimalnya pengelolaan sehingga pariwisata Danau Toba bisa dikatakan wisata yang belum produktif dalam pendapatan masyarakat dan pendanaan desa.

Dalam pengolahan limbah masih kurangnya perhatian terhadap pemerintah, karena masih adanya sampah yang bertumbuh disekitar Danau Toba. Pemerintah juga tidak melakukan pengecekan secara detail terhadap pembuangan limbah hotel. Serta masyarakat dan pengunjung masih kurangnya kesadaran terhadap penjagaan lingkungan.

Dapat diihat dari keramba jaring apung, pada tahun 2017 pemerintah melakukan pengurangan terhadap kegiatan ini. Karena pernah terjadi kematian ikan yang besar pada keramba tersebut. Dari kematian ikan itu dapat menyebabkan pencemaran air serta ekosistem pada perairan Danau Toba juga terganggu. Maka dari itu pemerintah mengambil kebijkan untuk mengurangi keramba jaring apung. Pada awalnya masyaraat menolak dengan kebijak

itu karena dapat meburangi mata pencarian mereka. Akan tetapi pemerintah mengambil keputusan/kebijakan denga tegas agar perairan Danau Toba bisa terjaga.

Dalam hal pengenalan dan promosi masih kurangnya kreatif terhadap promosi dalam pengenalan Danau Toba. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti masih kurangnya kreatif dalam melaksanakan promosi terhadap pengenalan Danau Toba. Seperti pada spanduk masih kurang menarik dalam segi penempatannya. Karena penempatan spanduk yang tepat bisa menarik perhatian calon pengunjung. Pada penggunaan media sosial untuk promosi dalam pengenalan pariwisata juga masih belum optimal untuk dilakukan, dimana dapat kita lihat pada sekarang ini kemajuan teknologi yang sangat canggih namun penggunaanya masih kurangnya keratif pada media sosial.

Dari hasil wawancara yang dilakukan ada beberapa hambatan yang ada pada Danau Toba misalnya masih kurangnya kreativitas dalam pengembangan pariwisata. Terdapat juga kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pemerintah terhadap Pariwisata dalam potensi wisata. Dari penjelesana mengenai hambatan dapat dikatakan dalam melaksanakan implemnetasi kebijakan pengembangan masihb elum maskimal, karena masih banyaknya kendala yang dihadapi..

Penutup

Kesimpulan

- a. Implementasi kebijakan pariwisata pada danau toba masih belum maksimal untuk dilaksanakan karena adanya keterbatasan pada komunikasi, sumber daya. Dimana pemerintah kabupaten simalungun masih kurang memperhatikan fasilitas yang aa pada pariwisata Danau Toba.
- b. Pada pengolahan keramba jaring apung, masih belum maksimal untuk dilaksanakan, karena sebagian besar merupakan mata pencaharian masyarakat sekitar Danau Toba.
- c. Pada pengolahan limbah di kawasan pariwisata danau toba, pemerintah Kabupaten Simalung masih kurang memperhatikan dalam penglahan

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

limbah seperti di Hotel. Dimanan dalam pengolahan limbah hoel menunjukkan bahwa hampir semua perusahaan yang tinggal di daerah ini tidak memiliki sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi standar,

- d. Pada kegiatan penegenalan promosi serta pengenalan dan promosi pariwisata danau toba masih kurangnya kreatif dalam melaksanagn promosi terhadap pengenalan Danau Toba. Seperti pada spanduk masih kurang menarik dalam segi penempatannya. Karena penempatan spanduk yang tepat bisa menarik perhatian calon pengunjung. Pada penggunaan media sosial untuk promosi dalam pengenalan pariwisata juga masih belum optimal untuk dilakukan, dimana dapat kita lihat pada sekarang ini kemajuan teknologi yang sangat canggih namun penggunaanya masih kurangnya keratif pada media sosial.

Adapun hambatan yang ada pada Danau Toba misalnya masih kurangnya kreativitas dalam pengembangan pariwisata. Terdapat juga kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pemerintah terhadap Pariwisata dalam potensi wisata. Dari penjelesana mengenai hambatan dapat dikatakan dalam melaksanakan implemnetasi kebijakan pengembangan masihb elum maskimal, karena masih banyaknya kendala yang dihadapi

Saran

- a. Agar pemerintah Kabupaten Simalungun lebih memperhatikan pariwisata Danau Toba agar menjalankan implementasi dalam pegembangan sesuai dengan semesteinya. Pemerintah danau toba juga berkordinasi dan berkolaborasi dengan pelaku pariwisata Danau Toba.
- b. Pemerintah Kabupaten Simalungun memeprhatikan kebijakan pariwisata danau toba yang mernjadi dampak kegiatan pariwisata Danau Toba.

Daftar Pustaka

- Dun, W. N. (2003). *pengantar analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dipayanaa, A., & Sunartaa, I. N. (2015). Dampak Pariwisata terhadap Alih Fungsi Lahan di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung (Studi Sosial-Budaya). *Jurnal Destinasi Pariwisata ISSN*, 2338, 8811.
- Edwards III, G. C. (2010). *Implementing Public Policy*. Jakarta.
- Guntur, S. (2004). *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. jakarta: Balai Pustaka hlm 39.
- Islamy, I. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Liang, G. T. (1998). *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nurdin, U. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Pendit, N. S. (1994). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Pressman, J. a. (1973). *Implementation*. Barkley and Los Angeles. *University of California Press*.
- Ryaas, R. (2000). *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Rahajaan, J. D., Kurniadi, E., Yusuf, F., Darmawan, E., & Herawati, R. M. (2020). Perancangan Konsep Ideal Desa Wisata Di Desa Cibinuang Kabupaten Kuningan. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 89-97.
- Wearing, S.L. and Donald, Mc. 2001. "The Development of Community Based Tourism: Re-Thinking The Relationsgip between Tour Operators and Development Agents as intermediaries in rural and isolated area Communities." *Journal of Sustainable Tourism*.

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Buku Teks

- Abdul, d. (2005). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Pranadjaja, M. R. (2003). *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafii, I. K. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tangkilisan, H. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Tarsito. (1978). *Pemerintah dan Diperintah*. Bandung: Tp.
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.